

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai negara agraris, Indonesia mengandalkan sektor pertanian untuk menopang kegiatan ekonomi. Sektor Pertanian menempati urutan ke tiga sebagai sektor dengan kontribusi terbesar terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional dengan nilai kontribusi sebesar 12,7% (BPS, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki tingkat kontribusi tinggi terhadap pendapatan negara Indonesia. Selain sebagai kontributor utama dalam peningkatan PDB Nasional, sektor pertanian juga menempati posisi sebagai mata pencarian utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) angkatan kerja di sektor pertanian, 38,23 juta orang atau sekitar 29,76% dari total 128,45 juta penduduk yang bekerja. Potensi angkatan kerja ini sangat penting dalam perencanaan pembangunan pertanian dan transformasi ekonomi nasional.

Kontribusi sektor pertanian yang cukup besar terhadap PDB Nasional sejalan dengan besarnya kontribusi pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang mengembangkan sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan. Selama tiga tahun terakhir hingga tahun 2019, sektor pertanian di Kabupaten Banyuwangi menjadi sektor dengan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Banyuwangi hingga tahun 2019 telah tercatat bahwa sektor pertanian dengan nilai sebesar 29,36% (BPS, 2020).

Kontribusi sektor pertanian yang cukup besar menuntut usaha pemerintah pusat dan daerah untuk terus meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sektor pertanian dimasa yang akan datang. Adapun usaha untuk memajukan sektor pertanian yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan pendekatan Penyuluhan. Penyuluhan pertanian merupakan suatu sistem pendidikan non-formal dalam bentuk pendidikan orang dewasa untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan petani dan keluarganya. Sasaran dari penyuluhan adalah sikap yang lebih baik dalam meningkatkan produksi usaha tani sesuai dengan potensi lokal. Peran penyuluh adalah menyampaikan inovasi pertanian, menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah, pengusaha, perbankan, dan pemasaran (Bahua, 2016).

Diseminasi inovasi hasil penelitian dan pengkajian pertanian merupakan aktivitas komunikasi yang penting dalam mendorong terjadinya proses penyebaran dan penerapan teknologi dalam suatu sistem sosial atau kelompok (Indraningsih, 2018). Keberhasilan seorang penyuluh ditentukan oleh kompetensinya dalam

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh petani, baik teknologi budidaya, harga, akses pasar dan permodalan maupun kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kerja penyuluh, untuk itu penyuluh harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, memiliki pengetahuan luas, bersikap mandiri dan mampu menempatkan dirinya sesuai dengan karakteristik petani. Penyuluh harus memiliki kemampuan menyusun rencana pembelajaran yang akan diimplementasikan melalui metode dan media pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pentingnya kompetensi penyuluh dalam menyampaikan informasi terkait pertanian ternyata tidak sejalan dengan kompetensi yang dimiliki penyuluh saat ini. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak penyuluh pertanian memiliki kompetensi yang rendah dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen perubahan di bidang pembangunan pertanian. Kenyataan ini dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di bidang pertanian yang menuntut seorang penyuluh bekerja bukan pada bidang yang ditekuninya.

Menurut Tjitropranoto (2003), bahwa penyuluh pertanian tidak mampu bahkan tidak sempat mengembangkan kemampuan profesionalnya sebagai pejabat fungsional penyuluh, karena banyaknya kegiatan yang ditetapkan atasannya, yang kadang-kadang tidak sesuai dengan tugas sebagai penyuluh pertanian professional. Menurut Sumardjo (2008) rendahnya kompetensi penyuluh antara lain diduga berkaitan dengan proses pembelajaran yang kurang bermutu, karena penyuluh terjebak pada tuntutan formalitas untuk penyesuaian ijasah bagi jabatan fungsional penyuluhan sesuai dengan jumlah kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan penyuluhan di kabupaten Banyuwangi pada tahun 2021 dilaksanakan oleh 156 penyuluh pertanian yang terdiri dari 38 orang penyuluh PNS, 53 Orang Penyuluh P3K, 1 Orang THL TBPP dan 64 orang pendamping penyuluh yang berada di 20 Balai Penyuluhan Pertanian. Jumlah kelembagaan petani binaan adalah 1844, terdiri dari 1600 Kelompok Tani, 201 Gapoktan, dan 43 Kelembagaan Ekonomi Petani (Simluhtan, 2021) dengan asumsi masing – masing penyuluh membina lebih kurang 12 kelembagaan petani. Jumlah kelompok tani binaan yang ideal menurut kementerian pertanian adalah 6-8 kelompok tani setiap satu orang penyuluh (Hernanda, 2015). Menurut UU No. 16 Tahun 2016 disebutkan idealnya jumlah penyuluh di Indonesia adalah satu Desa satu penyuluh, dengan demikian beban kerja penyuluh bertambah. Keadaan jumlah penyuluh di Banyuwangi dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Rasio Jumlah Penyuluh, Jumlah Kebutuhan Penyuluh dan Jumlah Desa Binaan di Kabupaten Banyuwangi

<b>BPP</b>	<b>Jumlah Penyuluh</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Penyuluh</b>	<b>Jumlah Desa Binaan</b>
BPP Pesanggaran	5	5	5
BPP Bangorejo	8	7	7
BPP Cluring	8	9	9
BPP Genteng	9	11	11
BPP Giri	7	8	8
BPP Glagah	10	18	18
BPP Kabat	8	14	14
BPP Kalibaru	12	13	13
BPP Muncar	8	10	10
BPP Purwoharjo	9	8	8
BPP Rogojampi	11	20	20
BPP Sempu	7	7	7
BPP Siliragung	5	5	5
BPP Singojuruh	9	11	11
BPP Songgon	7	9	9
BPP Srono	7	10	10
BPP Tegalsari	5	6	6
BPP Wongsorejo	7	12	12
BPP Kalipuro	5	9	9
BPP Tegaldlimo	9	9	9
<b>Jumlah Total</b>	<b>156</b>	<b>201</b>	<b>201</b>

Sumber : Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (2021)

Permasalahan terkait jumlah penyuluh yang terbatas (Kustiari et al. 2017), motivasi penyuluh yang masih rendah, dukungan kebijakan pemerintah daerah yang kurang, kelembagaan tidak terurus, serta kompetensi penyuluh yang rendah (Purwaningsih *et al*, 2018) adalah permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan penyuluhan termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Penyuluhan dan kepemimpinan penyuluh pertanian. Kompetensi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sangat rendah, hal ini antara lain ditunjukkan oleh: (1) bekal pengetahuan dan keterampilan penyuluh sangat kurang, bahkan seringkali tidak cocok dengan kebutuhan petani, (2) PPL sangat kurang dipersiapkan dan kurang dilatih untuk melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Bila PPL dilatih, maka kebanyakan latihan-latihan itu tidak relevan dengan tugasnya sebagai PPL di wilayah kerjanya, dan (3) dalam banyak hal, PPL telah ketinggalan informasi dari petani dan nelayan yang dilayaninya.

Kondisi dilapangan yang menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi penyuluh pertanian belum sepenuhnya memenuhi harapan penyuluh dan petani yang menjadi binaanya. Pramono H., dkk. (2017) menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi penyuluh belum optimal diakibatkan karena beberapa faktor, salah satunya yaitu beban kerja, minimnya pelatihan, dan faktor lain.

Menurut Teddy Rachmat Muliady (2009) kompetensi penyuluh pertanian dalam mengembangkan usaha tani padi sawah tergolong rendah dalam hal pengelolaan informasi penyuluhan dan kepemimpinan penyuluh. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu sebuah analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kompetensi penyuluh pertanian serta bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja, hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan dan mengembangkan kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian juga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana karakteristik penyuluh pertanian dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Banyuwangi
2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi?
4. Bagaimana pengaruh kompetensi penyuluh pertanian terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan beberapa masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah, ditetapkan beberapa tujuan, yaitu :

1. Mendeskripsikan karakteristik penyuluh pertanian dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian
2. Mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi
3. Menganalisis pengaruh dari faktor-faktor yang telah diidentifikasi terhadap kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi
4. Menganalisis pengaruh kompetensi penyuluh pertanian terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil yang diharapkan dari adanya penelitian terkait pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ini antara lain :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang terkait dengan masalah kompetensi penyuluh pertanian dan dapat digunakan sebagai bahan keilmuan di bidang penyuluhan pembangunan.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi pihak yang berkepentingan dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi penyuluh pertanian.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi dengan mengambil sampel semua penyuluh pertanian yang berada di kabupaten Banyuwangi, baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Tenaga Harian Lepas atau Non-ASN.

Beberapa aspek yang dikaji adalah faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kompetensi penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi, serta bagaimana pengaruh kompetensi penyuluh pertanian terhadap kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuwangi.